

KONFLIK ATURAN PENYERTAAN MODAL AWAL
BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PERATURAN
BUPATI PASURUAN NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PENYERTAAN MODAL DESA KEPADA
BADAN USAHA MILIK DAN BADAN USAHA MILIK
DESA BERSAMA DENGAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA
MILIK DESA

Sutrisno (124124034)

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Surabaya

Pembimbing Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konflik aturan modal awal BUM Desa dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyertaan Modal Desa kepada BUM Desa dan BUM Desa Bersama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa. Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang BUM Desa tersebut, maka ada beberapa Pasal dari Peraturan Bupati yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan penyertaan modal awal ke BUM Desa. Yang dilakukan peneliti adalah mengkaji melalui pendekatan asas *lex superior derogat legi inferiori* dimana aturan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi tingkatannya.

Jika Peraturan Bupati yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi tingkatannya maka akan berdampak pada ketidak adanya kepastian hukum, cacat administrasi dan berpotensi terjadinya sengketa hukum lainnya. Maka seharusnya Peraturan Bupati tersebut harus segera direvisi atau dibatalkan, hal ini dikarenakan peraturan ini sudah lama diterbitkan yaitu pada tahun 2020 sedangkan sudah ada peraturan yang lebih baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa. Maka perlu adanya peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kaitannya dengan Peraturan Bupati melalui Fungsi Pengawasan (*check and balance*), bukan Fungsi Legislasi. Fungsi DPRD dalam Revisi Peraturan Bupati sebagai Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati (dan Peraturan Kepala Daerah lainnya) untuk memastikan bahwa Peraturan Bupati tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kata Kunci : Peraturan Bupati Pasuruan, Peraturan Pemerintah, modal awal BUM Desa, Asas hukum, hierarki perundang-undangan dan Peran DPRD Kabupaten Pasuruan.

CONFLICT OF RULES ON INITIAL CAPITAL PARTICIPATION OF
VILLAGE-OWNED ENTERPRISES IN PASURUAN REGENT REGULATION
NUMBER 57 OF 2020 CONCERNING GUIDELINES FOR VILLAGE CAPITAL
PARTICIPATION IN VILLAGE-OWNED ENTERPRISES AND VILLAGE-
OWNED ENTERPRISES TOGETHER WITH GOVERNMENT REGULATION
NUMBER 11 OF 2021 CONCERNING VILLAGE-OWNED ENTERPRISES

Sutrisno (124124034)

Master of Law Program, University of Surabaya

Supervisor: Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.

Abstract

This study examines the conflict between initial capital regulations for Village-Owned Enterprises (BUM Desa) in Pasuruan Regent Regulation Number 57 of 2020 concerning Guidelines for Village Capital Participation in BUM Desa and Joint BUM Desa, and Government Regulation Number 11 of 2021 concerning BUM Desa. Since the issuance of the Government Regulation governing BUM Desa, several articles in the Regent Regulation have been inconsistent with the Government Regulation, particularly those relating to capital participation. The initial approach to BUM Desa. The researcher conducted a study using the principle of *lex superior derogat legi inferiori*, where lower-level regulations may not conflict with higher-level regulations.

If the Regent's Regulation conflicts with higher-level regulations, it will result in legal uncertainty, administrative flaws, and the potential for other legal disputes. Therefore, the Regent's Regulation should be immediately revised or revoked, as this regulation was issued long ago, in 2020, while a more recent regulation, Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises (BUM Desa), already exists. Therefore, the Regional Representative Council (DPRD) needs to play a role in relation to the Regent's Regulation through its oversight function (checks and balances), not its legislative function. The DPRD's role in revising the Regent's Regulation is to oversee the implementation of the Regent's Regulation (and other Regional Head Regulations) to ensure that the Regent's Regulation does not conflict with Regional Regulations (Perda), the Regional Budget (APBD), the public interest, and higher-level laws and regulations.

Keywords: Pasuruan Regent's Regulation, Government Regulations, BUM Desa initial capital, legal principles, legal hierarchy, and the Role of the Pasuruan Regency DPRD.

